

sembari **minum** **kopi**

BIROKRAT KELAS MENENGAH

Oleh:

Ariel Heryanto

Pertengahan Januari 1997, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City gempar gara-gara sejumlah surat berisi bom. Beberapa hari sebelumnya peristiwa yang sama terjadi di sejumlah kantor media massa *Al Hayat* di Washington D.C. dan London. Rangkaian peristiwa itu sempat menjadi berita utama di berbagai negeri, termasuk Indonesia.

Pada hari-hari yang bersamaan terbetik berita dari Malang, Jawa Timur, tentang kiriman pos bermasalah. Akhir tahun lalu, 93 paket pos bikin repot petugas bea cukai dan kejaksaan. Bukannya paket itu berisi bom, tetapi buku-buku tebal berbahasa Eropa. Buku-buku itu ditahan dan diperiksa kejaksaan. Kemungkinan besar akan dimusnahkan. Mengapa? Menurut berita di beberapa harian, sebagian dari buku itu ditulis oleh seorang filosof besar bernama Karl Marx yang kemudian memberi ilham berdirinya komunisme. Buku-buku itu dianggap sebagai barang terlarang. Pengirimnya (seorang warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Jerman dan akan pulang ke tanah air) bisa diperiksa dengan undang-undang antisubversi.

Berita dari Malang itu mengingatkan saya akan sebuah pengalaman pribadi. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat undangan untuk memberikan kuliah tentang kesusastraan Indonesia di Amerika Serikat. Pulang dari sana, lewat pos paket saya mengirimkan buku-buku yang saya jadikan bahan kuliah. Bersamaan dengan tibanya paket-paket itu di alamat saya di Salatiga, saya menerima sebuah pemberitahuan bahwa salah satu buku saya telah disita oleh pihak bea cukai di Semarang.

Bukan, itu bukan buku yang berisi Marxisme. Yang disita itu adalah sebuah novel karangan seorang yang antikomunis dan antimarxisme. Buku itu disita karena judulnya *Atheis* karya Achdiat Kartamihardja. Ironisnya, bukan saja isi novel itu menjelek-jelekkan komunisme. Novel itu diterbitkan oleh badan pemerintah Orde Baru. Dicitak beberapa belas kali di sepanjang masa jaya Orde Baru. Dijual di hampir semua toko buku besar di tanah air, dijadikan salah satu bacaan wajib di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Lewat surat pembaca di koran Semarang, saya memberikan penjelasan ala kadarnya dan berharap miskomunikasi itu dapat dijernihkan. Dalam waktu kurang dari 12 jam seorang petugas bea cukai mengantarkan buku 'bermasalah' itu ke alamat saya dengan permintaan maaf. Petugas negara dan pegawai negeri bisa ramah. Yang barangkali masih kurang adalah pendidikan tentang khasanah sastra Indonesia. Kuliah tentang itu mungkin lebih perlu diperbanyak di tanah air sendiri ketimbang di Amerika Serikat.

Kisah itu tak perlu diungkapkan kembali di sini seandainya kesalahpahaman itu hanya terjadi sekali. Atau semata-mata merupakan sebuah pengalaman pribadi, gara-gara khilafnya seorang individu 'oknum'.

Dalam sebuah sidang pengadilan subversi di Indonesia di awal dekade ini ada kejadian yang mirip. Sebuah novel tenar karya seorang sastrawan Indonesia yang antikomunisme dijadikan salah satu barang bukti pelanggaran pidana yang didakwakan pihak kejaksaan terhadap pemiliknya. Novel itu berjudul *Merahnya Merah* karya Iwan Simatupang. Terdakwa dinyatakan bersalah, dan novel surealis itu ikut divonis. Jaksa menuntut novel itu dimusnahkan. Hakim mendukung tuntutan jaksa.

Kejadian itu dipertontonkan umum dan diawasi pemerhati hak asasi manusia dari mancanegara. Menggelikan, memprihatinkan, atau kedua-duanya sekaligus?

Membandingkan kejadian di Malang dengan dua peristiwa yang saya kisahkan di atas perlu diberi penjelasan tambahan. Buku-buku karya Karl Marx terlanjur dianggap barang terlarang, sedang novel-novel Achdiat Kartamihardja dan Iwan Simatupang diresnui pemerintah Orde Baru. Petugas kantor pos dan bea cukai Malang seakan-akan menjalankan tugas dengan cermat. Sedang rekannya di Semarang atau lembaga pengadilan Yogyakarta khilaf atau pura-pura khilaf.

Tetapi perbedaan itu perlu disimak lebih jauh. Menurut sejumlah ahli hukum Indonesia, kampanye permusuhan terhadap buku-buku karya Marx mengandalkan Ketetapan MPRS No. 25/1966. Padahal, dokumen itu hanyalah melarang penyebaran dan pengembangan paham yang disebut 'Komunisme/Marxisme-Leninisme'.

Apakah semua karya Marx (termasuk surat-surat cintanya) merupakan karya tulis berpaham Marxisme? Apakah semua karya yang jelas-jelas bercorak Marxisme sama dengan 'Komunisme/Marxisme-Leninisme'? Di sini, orang bisa berdebat. Tentu saja, para petugas bea cukai tak banyak berminat terhadap perdebatan semacam itu. Sedang jaksa dan hakim saja yang memutuskan hidup-mati warga negara belum tentu punya selera.

Lagi pula sering diabaikan orang bahwa Ketetapan MPRS No. 25/1966 tidak menyerukan pemusnahan terhadap apa pun secara mutlak dan membabi-but. Ketetapan itu secara eksplisit merestui orang mempelajari paham "Komunisme/Marxisme-Leninisme" secara ilmiah. Perkecualian itu dapat dipahami. Bagaimana mungkin pemimpin bangsa ini, dan calon pemimpin dari generasi berikutnya, dapat menentukan sikap yang cermat dan tepat terhadap paham apa pun bila mereka tak pernah diberi kesempatan belajar secara kritis membedah paham bersangkutan?

Beberapa hari yang lalu, Presiden Soeharto sendiri dengan fasih dapat menjelaskan teori 'desa me-kota' yang menurut beliau menjadi ngepung strategi lagi. Para tokoh itu tidak mempunyai publik yang dapat mencerna buah pemikiran mereka, karena tak pernah diberi kesempatan mempelajarinya.

Akibat yang ekstrem ada dua macam. Pertama, masyarakat Orde Baru telah melahirkan sebuah generasi yang punya ciri khas buta tentang beberapa sisi terpenting dalam sejarah zamannya. Seorang pejabat penting dari Universitas Indonesia pernah mengeluhkan susahny mendatangkan buku-buku perkuliahan beraksara Cina untuk Jurusan Studi Cina. Akibat ekstrem yang lain: terjadi pelebaran lingkup pelanggaran Ketetapan MPRS dan perluasan tindakan represi terhadap apa pun yang seakan-akan berbau Marxisme.

Para pejabat negara, khususnya di tingkat menengah,

memusnahkan buku-buku bukan karena didorong kebenaran terhadap apa yang dimusnahkan. Tetapi didasarkan ketidaktahuan terhadap apa yang dimusnahkan dan ketakutan kalau-kalau nanti disalahkan bila tidak bertindak demikian.

Tidak terlalu sulit untuk memahami sosiologi ketakutan sejenis itu. Ia tidak perlu terjadi seandainya hubungan atasan-bawahan bersifat lebih terbuka dan nalar. Seandainya atasan tidak dapat semauanya menghukum bawahan.

Itu gejala khas di kalangan menengah di Indonesia atau mana pun. Kalangan elite politik Orde Baru sendiri bisa bertindak lebih rasional dan liberal.

Ketetapan MPRS No. 25/1966 adalah produk Perang Dingin yang sudah lama berakhir. Elite masyarakat kita kini sibuk menjalin kerjasama diplomasi dan ekonomi dengan negara seperti Vietnam yang mengaku memuja karya-karya Marx. Sanak keluarga pejabat tinggi kita sering menghabiskan masa liburan dengan berpelesir di negeri Tiongkok, resminya pusat komunisme dunia. Di tingkat jelata, kebanyakan manusia Indonesia juga mungkin tidak terlalu perduli pada Marxisme atau ideologi apa pun di dunia ini. Besar sekali kemungkinannya mereka juga tak berselera mempersoalkan SARA.

Hanya di tingkat menengah kita menjumpai sikap-sikap ekstrem, sebuah kompensasi untuk keresahan akibat pengetahuan dan sumber daya-dana yang serba tanggung. Tidak hanya dalam gaya hidup atau moralitas terhadap seksualitas kelas menengah cenderung lebih kolot ketimbang kelas atas atau bawah. Juga dalam politik. Ini gejala yang universal. Elite politik di RRC maupun Vietnam tidak lagi memusuhi 'pasar bebas' yang menjadi lahan 'kapitalisme'. Rakyat mereka suka permen karet, konser Madonna, Coca Cola, ataupun *post-modernism*. mati-matian

Kalau masih ada yang melitsus kesetiaan ideologi rakyat bagi komunisme, mungkin mereka adalah birokrat kelas menengah yang ketinggalan kereta sejarah.

Hanya di Indonesia tahun 1996 sebuah paket berisi buku Marx bisa menjadi sebuah berita koran. Bukan bom surat. Hanya di Indonesia sebuah kerusuhan sosial tahun 1996 bisa dikait-kaitkan dengan komunisme.

Yang agak membesarkan hati, berita dari kantor pos Malang itu tidak menjadi berkepanjangan seperti layaknya beberapa dekade yang lampau. Berita itu kecil dan segera pudar diabaikan publik. Sementara tuduhan komunis di balik kerusuhan 27 Juli menguap begitu saja.

Biar lamban, publik Indonesia sudah semakin dewasa dan telah beranjak dari kubangan mental Perang Dingin.

* Dosen di National University of Singapore, mukim di Singapura.

